


CIVIC EDUCATION

Pendidikan Kewarganegaraan



**Menuju Kehidupan
yang Demokratis
dan Berkeadaban**

DAFTAR ISI

Halaman	v	Pengantar Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Halaman	xiii	Daftar Isi
Halaman	xxiii	Pendahuluan: Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Keniscayaan
Halaman	1	Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

HALAMAN 41

BAB 1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN CITA-CITA MENUJU MASYARAKAT MADANI

Halaman	42	Tujuan Pembelajaran
Halaman	42	Istilah-Istilah Penting
Halaman	43	Pengantar
Halaman	44	Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
Halaman	46	Konsep Masyarakat Madani
Halaman	59	Aktualisasi Masyarakat Madani
Halaman	67	Pengembangan Nilai-Nilai Kewargaan
Halaman	72	Ikhtisar
Halaman	73	Soal-Soal
Halaman	75	Daftar Pustaka

HALAMAN 77**BAB 2****TINJAUAN UMUM TENTANG NILAI-NILAI
DEMOKRASI**

Halaman	78	Tujuan Pembelajaran
Halaman	78	Istilah-Istilah Penting
Halaman	79	Pengantar
Halaman	81	Nilai-Nilai Demokrasi
Halaman	82	Kebebasan Menyatakan Pendapat
Halaman	85	Kebebasan Berkelompok
Halaman	88	Kebebasan Berpartisipasi
Halaman	92	Kesetaraan Antar-Warga
Halaman	94	Kesetaraan Gender
Halaman	96	Kedaulatan Rakyat
Halaman	98	Rasa Percaya (<i>Trust</i>)
Halaman	100	Kerjasama
Halaman	102	Pertumbuhan Ekonomi
Halaman	107	Pluralisme
Halaman	108	Negara dan Masyarakat
Halaman	111	Ikhtisar
Halaman	112	Soal-Soal
Halaman	114	Daftar Pustaka

HALAMAN 115**BAB 3****PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS**

Halaman	116	Tujuan Pembelajaran
Halaman	116	Istilah-Istilah Penting
Halaman	117	Pengantar
Halaman	119	Pemerintahan yang Bersih
Halaman	122	Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan
Halaman	122	Sistem Pemerintahan Parlementer
Halaman	125	Sistem Presidensial
Halaman	128	Kekuasaan Eksekutif Terbatas
Halaman	132	Pemberdayaan Badan Legislatif
Halaman	136	Sistem Pemilihan
Halaman	137	Sistem Proporsional
Halaman	138	Sistem Distrik
Halaman	138	Sistem Multiple-Distrik
Halaman	139	Sistem Kepartaian
Halaman	140	Sistem Dua-Partai
Halaman	141	Sistem Multi-Partai
Halaman	145	Fragmentasi partai
Halaman	146	Budaya Koalisi
Halaman	147	Budaya Oposisi
Halaman	149	Peranan Organisasi Non-Partai
Halaman	153	Media Massa
Halaman	156	Anti-Korupsi
Halaman	160	Kepastian Hukum
Halaman	163	Otonomi Daerah
Halaman	168	Ikhtisar
Halaman	169	Soal-Soal
Halaman	171	Daftar Pustaka

HALAMAN 173

BAB 4

**TRANSFORMASI NILAI DEMOKRASI DALAM
KELUARGA DAN MASYARAKAT**

Halaman	174	Tujuan Pembelajaran
Halaman	174	Istilah-Istilah Penting
Halaman	175	Pengantar
Halaman	177	Hak dan Tanggung Jawab dalam Keluarga
Halaman	180	Hak dan Tanggung Jawab dalam Masyarakat
Halaman	183	Bentuk-Bentuk Dukungan dan Perlindungan dalam Keluarga
Halaman	186	Bentuk-Bentuk Dukungan dan Perlindungan dalam Masyarakat
Halaman	190	Pengembangan Nilai-Nilai Akhlak dalam Keluarga
Halaman	192	Pengembangan Nilai-Nilai Akhlak dalam Masyarakat
Halaman	194	Kesetaraan Gender dalam Keluarga dan Masyarakat
Halaman	201	Ikhtisar
Halaman	202	Soal-Soal
Halaman	203	Daftar Pustaka

HALAMAN 205**BAB 5****MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL**

Halaman	206	Tujuan Pembelajaran
Halaman	206	Istilah-Istilah Penting
Halaman	207	Pengantar
Halaman	209	Pengertian Identitas Nasional
Halaman	210	Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional
Halaman	214	Kemajemukan dan Integrasi Nasional
Halaman	221	Ideologi
Halaman	227	Jenis-Jenis Ideologi
Halaman	228	Marxisme, Komunisme, dan Sosialisme
Halaman	231	Liberalisme dan Kapitalisme
Halaman	233	Nasionalisme
Halaman	236	Feminisme
Halaman	238	Pluralisme
Halaman	241	Postmodernisme
Halaman	243	Islam sebagai Ideologi
Halaman	245	Pancasila sebagai Ideologi
Halaman	249	Ikhtisar
Halaman	250	Soal-Soal
Halaman	251	Daftar Pustaka

HALAMAN 255**BAB 6****TATA DUNIA BARU DALAM GLOBALISASI**

Halaman	256	Tujuan Pembelajaran
Halaman	256	Istilah-Istilah Penting
Halaman	257	Pengantar
Halaman	262	Globalisasi Ekonomi dalam Dilema
Halaman	275	Dilema Politik Global
Halaman	285	Homogenisasi dan Reproduksi Budaya dalam Globalisasi
Halaman	291	Konflik dan Perdamaian dalam Globalisasi
Halaman	300	Transformasi Nilai Islam dalam Globalisasi
Halaman	302	Islam dan Pluralisme
Halaman	303	Islam dan Perdamaian
Halaman	304	Islam dan Keterbukaan
Halaman	306	Islam dan Lingkungan Hidup
Halaman	307	Islam, Keadilan, dan Pemberdayaan
Halaman	308	Islam dan Emansipasi Harkat Kemanusiaan
Halaman	309	Islam dan Ilmu Pengetahuan/Teknologi
Halaman	311	Islam dan Etos Pribadi
Halaman	313	Ikhtisar
Halaman	314	Soal-Soal
Halaman	316	Daftar Pustaka

HALAMAN 319 BAB 7
EKONOMI KERAKYATAN DAN ETOS EKONOMI
SEBAGAI BASIS KEKUATAN NASIONAL

Halaman	320	Tujuan Pembelajaran
Halaman	320	Istilah-Istilah Penting
Halaman	321	Pengantar
Halaman	322	Refleksi Sejarah Ekonomi Indonesia
Halaman	326	Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Ekonomi
Halaman	329	Ekonomi Kerakyatan Sebagai Standar Etika Bisnis Indonesia
Halaman	331	Prospek dan Tantangan Perekonomian Rakyat
Halaman	334	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Halaman	339	Instrumen Kebijakan pada Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Halaman	341	Kewirausahaan dan Kemitraan Sebagai Manifestasi dari Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Halaman	347	Transformasi Nilai Islam dalam Pembangunan Ekonomi
Halaman	352	Prinsip-Prinsip Islam dalam Membangun Sistem Ekonomi
Halaman	354	Hubungan Industrial dalam Islam
Halaman	356	Transformasi Islam dalam Etos Kerja
Halaman	364	Ikhtisar
Halaman	365	Soal-Soal
Halaman	366	Daftar Pustaka

HALAMAN 367 BAB 8
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Halaman	368	Tujuan Pembelajaran
Halaman	368	Istilah-Istilah Penting
Halaman	369	Pengantar
Halaman	370	Pengertian Hak Asasi Manusia
Halaman	372	Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia
Halaman	374	Sejarah Perkembangan HAM
Halaman	380	HAM dalam Perspektif Islam
Halaman	384	Hak Hidup
Halaman	387	Hak Kebebasan Beragama
Halaman	392	Hak atas Keadilan
Halaman	394	Hak Kebebasan Berpikir dan Berpendapat
Halaman	395	Hak Bekerja
Halaman	396	Hak Politik
Halaman	397	Dimensi Historis HAM dalam Islam
Halaman	397	Piagam Madinah
Halaman	399	Deklarasi Kairo (<i>Cairo Declaration</i>)
Halaman	402	HAM dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia
Halaman	406	Realitas Penegakan HAM di Indonesia
Halaman	408	Penegakan HAM Sebagai Sarana Utama untuk Mewujudkan Masyarakat Madani
Halaman	411	Ikhtisar
Halaman	412	Soal-Soal
Halaman	413	Daftar Pustaka

Halaman	415	Halaman Lampiran
Halaman	416	Lampiran 1: Piagam Madinah
Halaman	422	Lampiran 2: Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Halaman	430	Lampiran 3: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (dan Amandemennya)



MUNCULNYA GELOMBANG REFORMASI di akhir dekade 90-an membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia, di samping juga menyisakan persoalan-persoalan sosial baru pada masa transisi yang belum terselesaikan. Dalam membangun landasan demokrasi dan masyarakat madani yang kokoh, terutama dalam masa transisi menuju demokrasi, di mana muncul fenomena patologi sosial akibat euphoria politik, maka demokrasi dan masyarakat madani tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanam, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, “pohon demokrasi dan masyarakat madani” yang sudah mulai tumbuh bersama “gelombang besar” demokrasi, hak asasi manusia, dan *civil society* di berbagai belahan dunia akan layu dan mati sebelum berurat dan berakar.

Cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi dan menjadi *civilized*” adalah melalui “pendidikan kewarganegaraan”. Di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna sosialisasi, desiminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada dibalik penerapan pendidikan kewarganegaraan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.

Agaknya, pendidikan kewarganegaraan saat ini sudah sedemikian mendesak untuk dilakukan, dan Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari *Civil Society Organizations* (CSO's) perlu mengambil peran yang signifikan melalui jaringan amal usaha pendidikan yang tersebar di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Setidaknya, upaya ini diharapkan dapat mengeliminasi fenomena patologi sosial yang tersisa dari proses transisi menuju demokratisasi di negeri ini, meliputi delapan gejala, yaitu, 1) hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat; 2) memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas; 3) kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat; 4) memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong; 5) melemahnya nilai-nilai dalam keluarga; 6) praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah; 7) kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi; 8) pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan.

ISBN: 979-98053-0-9



MAJELIS DIKLATIBANG
PP MUHAMMADIYAH



Lembaga Penelitian &
Pengembangan Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Didukung oleh:

